



LAPORAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2024

BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BALIKPAPAN
TAHUN 2024

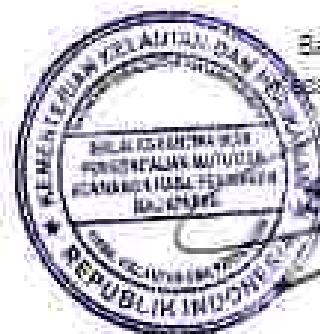
KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Balikpapan (LKJ) Tahun 2024 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Balai KIPM Balikpapan dalam penggunaan anggaran yang akuntabel untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Laporan ini menguraikan informasi terkait pencapaian kinerja, kendala dan upaya harus dilakukan dalam rangka pencapaian target Tahun.

Landasan penyusunan laporan ini adalah Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Balai KIPM Balikpapan Tahun 2024. Secara umum target indikator kinerja yang ditetapkan pada periode triwulan I tahun 2024 telah dicapai sesuai target yang ditetapkan. Kami berharap laporan kinerja ini dapat bermanfaat sebagai sarana akuntabilitas dan pertanggungjawaban organisasi serta dapat dijadikan bahan masukan untuk peningkatan kinerja Balai KIPM Balikpapan di masa mendatang.

Ungkapan terimakasih kepada seluruh pihak dan jajaran pegawai Balai KIPM Balikpapan yang telah membantu dan mendukung pencapaian kinerja Balai KIPM Balikpapan Triwulan I tahun 2024.

Kami menyadari laporan ini jauh dari sempurna, untuk itu saran, tanggapan maupun masukan yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan kedepannya.



Balikpapan, 01 April 2024
Kepala Balai KIPM Balikpapan

Eko Setyawan

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR TABEL.....	3
DAFTAR GAMBAR.....	4
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	5
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 LATAR BELAKANG.....	3
1.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	6
1.3 STRATEGI ORGANISASI.....	11
1.4 SISTEMATIKA PENYAJIAN.....	12
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	
2.1 VISI DAN MISI.....	13
2.2 SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA.....	14
2.3 PENGUKURAN KINERJA.....	19
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 CAPAIAN KINERJA.....	17
3.2 ANALISIS DAN EVALUASI.....	19
3.3 REALISASI ANGGARAN.....	42
3.4 EFISIENSI ANGGARAN.....	43
BAB IV. PENUTUP	
4.1 KESIMPULAN.....	45
4.2 REKOMENDASI.....	46
LAMPIRAN.....	47

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Triwulan I Tahun 2024	6
Tabel 2. Target Indikator Kinerja Kegiatan BKIPM Balikpapan Triwulan I Tahun 2024	15
Tabel 3. Capaian Indikator Kinerja BKIPM Balikpapan Triwulan I Tahun 2024	19
Tabel 4. Capaian Sasaran Kegiatan 1 Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan Triwulan I Tahun 2024	20
Tabel 5. Capaian Sasaran Kegiatan 2 Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan Triwulan I Tahun 2024	28
Tabel 6. Nilai Parsipar, Nilai Interval SKM, Nilai Interval Konversi SKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan	30
Tabel 7. Capaian Sasaran Kegiatan 3 Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan Triwulan I Tahun 2024	38
Tabel 8. Penyerapan Anggaran Per Jenis Belanja Triwulan I Tahun 2024	43
Tabel 9. Penyerapan Anggaran Berdasarkan Kegiatan Triwulan I Tahun 2024	43

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1. Struktur Organisasi BKIPM Balikpapan	10
Gambar 2. Peta Strategis BKIPM Balikpapan Tahun 2024	14
Gambar 3. Dashboard Capaian IK dan IKU Pada Sistem Aplikasi Kinerja Tahun 2024:	17
Gambar 4. Kegiatan Inspeksi / Verifikasi Tahunan CPB di Suplier	22
Gambar 5. Kegiatan Inspeksi Traceability di Unit Pengolahan Ikan	23
Gambar 6. Kegiatan Inspeksi / Monitoring dan Evaluasi Penerapan HACCP di UPI	25
Gambar 7. Kegiatan Survei Konsistensi Penerapan HACCP di UPI	27
Gambar 8. Tangkap Layar Aplikasi SIDAK Triwulan I Tahun 2024	35

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada tahun 2024 Balai KIPM Balikpapan mempunyai 3 (tiga) Sasaran Kegiatan dengan 14 (empat belas) Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2024. Penetapan Kinerja mengacu pada Rencana Strategis Balai KIPM Balikpapan tahun 2020-2024. Pengukuran atas pencapaian kinerja dilakukan secara triwulanan, semester dan tahunan. Pencapaian atas target indikator kinerja menjadi Nilai Kinerja Organisasi (NKO), Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Balikpapan pada periode Triwulan I tahun 2024 adalah sebesar 113,95 % dengan kategori istimewa, dibandingkan dengan tahun 2024 capaian ini mengalami kenaikan. Nilai ini diperoleh berdasarkan pencapaian sasaran kegiatan dan target Indikator Kinerja Kegiatan Balai KIPM Balikpapan tahun 2024 yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan capaian indikator kinerja kegiatan Balai KIPM Balikpapan pada periode triwulan I tahun 2024 sudah tercapai dengan sangat baik. Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja 14 indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan pada tahun 2024, terdapat 6 indikator Kinerja Kegiatan yang pencapaiannya memenuhi atau melebihi target dan 8 Indikator Kinerja Kegiatan yang belum ada realisasi pada Triwulan I, karena target pencapaian dilakukan per semester dan tahunan. Adapun capaian uraian dari Indikator Kinerja Kegiatan sebagaimana tersebut adalah :

Kode	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Tahun 2024			Tercapai (%)
			Target	Triwulan I	Realisasi (Triwulan I)	
SK 1.1 Tereleenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan, sumber profesional dan partisipatif						
K1	Jumlah simula CPIS saat yang dilakukan tingkat BKPM Balikpapan	Liputan	10	1	3	100
K2	UPT Pengawasan dan 1 (satu) Pengambilan Sampel yang dilaksanakan sesuai prosedur tingkat BKPM Balikpapan	UPT	3	1	1	100
K3	Simulasi Risiko Avoidance Critical Control Point (sABCCP) yang tingkat produk pada UPT tingkat BKPM Balikpapan	Produk	10	1	1	100
K4	UPT yang kondisi memuatkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan tingkat BKPM Balikpapan	UPT	4	1	1	100

Kode	Indikator Kinerja Kegiatan	Status	Target Triwulan	Tahun 2024		A
				Target Bulanan	Realisasi	
IK 2.1. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem mutu dan keamanan hasil pelayanan, secara profesional dan partisipatif						
IK 5	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Input BKIPM Balikpapan	Yes	84	84	92,15	115,00
IK 6	Laporan Utama Pelayanan yang mempunyai Quality Assurance sesuai standar sistem dan input lingkup BKIPM Balikpapan	Laporan	4	-	-	-
IK 3.1. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM						
IK 7	Indeks Profesionalitas ASN Internal BKIPM Balikpapan	Nilai	88	-	-	-
IK 8	Nilai Realisasi Monev SARIP Input BKIPM Balikpapan	Nilai	92	-	-	-
IK 9	Persentase penyelesaian Internal SPN lingkup BKIPM Balikpapan	Persentase	100	-	-	-
IK 10	Frekuensi pelaksanaan hasil pengawasan yang diterbitkan untuk perbaikan kerja lingkup BKIPM Balikpapan	Persentase	80	80	100	120
IK 11	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BKIPM Balikpapan	Nilai	93,15	-	-	-
IK 12	Nilai Kinerja Program Input BKIPM Balikpapan	Nilai	88	-	-	-
IK 13	Tingkat kepatuhan pengaduan barang/jasa lingkup BKIPM Balikpapan	Persentase	80	-	-	-
IK 14	Tingkat kepatuhan SPN lingkup BKIPM Balikpapan	Persentase	88	-	-	-

Tabel 1. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Triwulan I Tahun 2024 Lingkup BKIPM Balikpapan

KINERJA KEUANGAN TAHUN 2024

Capaian Kinerja keuangan Balai KIPM Balikpapan Tahun 2024 sampai dengan Triwulan I telah terealisasi sebesar Rp. 1.528.672.681,- atau sebesar 23,78% dari pagu anggaran sebesar Rp. 6.418.500.000,-. Anggaran Balai KIPM Balikpapan tahun 2024 telah mengalami perubahan atau revisi sebesar Rp. 4.311.582.000,- karena adanya pengalihan 25 orang pegawai ke Badan Kertantana Indonesia dan pagu anggaran Rp. 10.728.082.000,- menjadi Rp. 6.416.500.000,- serta pemblokiran anggaran sebesar Rp. 438.500.000,-. Namun perubahan pagu anggaran ini tidak mempengaruhi capaian kinerja Balai KIPM Balikpapan triwulan I tahun 2024, hal ini dibuktikan dengan capaian kinerja organisasi sebesar 113,95 %, dimana kegiatan tetap dapat terlaksana dengan baik dengan anggaran yang tersedia.

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Balai KIPM Balikpapan merupakan salah satu UPT BPPMHKP-Kementerian Kelautan dan Perikanan. BPPMHKP mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPPMHKP dituntut untuk melaksanakan secara prudent, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu asas penyelenggaraan good-governance adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Balai KIPM Balikpapan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada tahun 2024 untuk mencapai visi dan misi Balai KIPM Balikpapan. Di samping itu, juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap satuan kerja di lingkungan Balai KIPM Balikpapan serta sarana untuk mendapatkan masukan bagi stakeholder demi perbaikan kinerja Balai KIPM Balikpapan.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pengisian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Rerivitas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, BPPMHKP mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. Dalam melaksanakan tugasnya, BPPMHKP menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- b) Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- c) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- d) Pelaksanaan administrasi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Unit Pelaksana Teknis Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan pemantauan dan evaluasi rencana, program, dan anggaran serta pelaporan dibidang pelayanan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan;
- b) Pelaksanaan pengujian mutu produk hasil kelautan dan perikanan;
- c) Pelaksanaan sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan;
- d) Pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilan, audit, dan pengambilan contoh produk hasil kelautan dan perikanan di unit pengolahan ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu;
- e) Penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium;
- f) Penindakan pelanggaran pengendalian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- g) Pengumpulan, pengolahan data dan informasi dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan;
- h) Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi BPPMHKP, Kepala Balai KIPM Balikpapan dibantu oleh Kepala Sub Bagian Umum dan kelompok Jabatan Fungsional.

Jumlah SDM aparatur yang mendukung Balai KIPM Balikpapan sejumlah 19 pegawai, 9 orang PPNPN dan 3 orang outsourcing. ASN di BKIPM Balikpapan terdiri dari 2 pegawai pejabat struktural, 2 pegawai fungsional umum, 8 pegawai fungsional inspektur mutu, 2 pegawai fungsional arsiparis, 3 pegawai fungsional keuangan dan 1 pegawai fungsional BMN. Distribusi pegawai yang beranibang ini diperlukan dalam membentuk workforce yang efektif dan efisien.



Gambar 1. Struktur Organisasi Balai KIPM Balikpapan

1.3. STRATEGI ORGANISASI

Aspek strategi organisasi merupakan penjabaran lebih detail dari tujuan Balai KIPM Balikpapan dengan indikator dan target yang terukur. Aspek strategi tersebut dijabarkan melalui Sasaran Kegiatan Balai KIPM Balikpapan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan 1 : Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Professional dan Partisipatif

Meningkatkan ekspor produk perikanan dengan pengendalian dan pengawasan mutu produk hasil kelautan dan perikanan mulai dari hulu sampai hilir, sejak ikan ditangkap sampai diekspor ke negara tujuan. Penjaminan keterelusuran (*traceability*) produk sehingga apabila terjadi masalah / penanganan mudah untuk menelusuri dan mengambil tindakan perbaikan.

Upaya menjamin keberterimaan produk perikanan di Negara tujuan dilakukan melalui kegiatan Sertifikasi Cara penanganan ikan yang Baik (OPIB) di Suplier, melakukan Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) di Unit Pengolahan Ikan (UPI), melakukan inspeksi pada UPI yang menerapkan sistem *traceability* dan melakukan surveilan pada UPI terhadap konsistensi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan Hasil perikanan, sehingga produk perikanan yang diekspor diterima di negara tujuan ekspor.

Sasaran Kegiatan 2 : Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Professional dan Partisipatif

Peningkatan ekspor hasil kelautan dan perikanan selain melalui pengendalian dan pengawasan mutu produk hasil kelautan dan perikanan, juga dilakukan melalui peningkatan pelayanan kepada pelaku usaha, sehingga pelaku usaha merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan, menindaklanjuti setiap keluhan maupun permasalahan yang dihadapi pelaku usaha, melakukan verifikasi pengendalian sistem jaminan mutu di bidang budidaya dan penangkapan.

Sasaran Kegiatan 3 : Tatakelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup BPPM/KCP

Melaksanakan pengelolaan organisasi yang bersih, efektif dan terpersaya melalui penyediaan data dan informasi yang baik, benar dan akurat, peningkatan kompetensi sumberdaya manusia aparatur, kelengkapan sarana dan prasarana penunjang kegiatan.

1.4. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika dan penyajian LKJ Tahun 2024 mengujuk pada aturan dan ketentuan yang berlaku seperti dalam Permangan RB nomor 53 Tahun 2014 tentang Peraturan Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reriu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:

- a. Bab I – Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategis/cepat) yang sedang dihadapi organisasi;
- b. Bab II – Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan;
- c. Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;
- d. Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya;
- e. Lampiran, memuat Penetapan Kinerja Tahun 2024 dan hal-hal lainnya

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1. VISI DAN MISI

Sesuai dengan mandat yang diberikan kepada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang selaras dengan visi IKP 2020-2024 adalah mendukung Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan. Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 6 Tahun 2017, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan, Balai KIPM Balikpapan sebagai UPT dan BPPMHKP merencanakan 3 (tiga) dan 4 (empat) misi KKP dalam Renstra 2020-2024, yaitu:

1. Misi ke-2 yakni Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
2. Misi ke-4 yakni Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
3. Misi ke-8 yakni Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpersejaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020-2024, telah ditetapkan 4 (empat) tujuan pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Balai KIPM Balikpapan sebagai UPT BIPM turut bertanggungjawab pada pencapaian 4 (empat) tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu:

1. Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan mendukung pengelolaan kelautan dan perikanan yang optimal melalui penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan sebagai upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, ikan dan lingkungan;
2. Meningkatnya nilai tambah dengan mendukung berkembangnya industri perikanan hulu hilir melalui standarisasi dan layanan sertifikasi dalam rangka peningkatan daya saing dan meningkatnya kinerja ekspor produk perikanan;
3. Meningkatnya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif;
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik.

2.2. SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Peta strategis, sasaran kegiatan dan indikator kinerja Balai KIPM Balikpapan tahun 2024 ditunjukkan pada Gambar 2. dan Tabel 2. dibawah ini.



Gambar 2. Peta Strategis BKIPM Balikpapan Tahun 2024

Kode	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Tahun 2024	Target Triwulan I
IKK 1	Jumlah sertifikat CPB supplier yang diterbitkan lingkup BKIPM Balikpapan	Laporan	10	1
IKK 2	Unit Perancangan dan / atau Pengelolaan Ikan yang menerapkan Sistem Traceability lingkup BKIPM Balikpapan	UPI	3	1
IKK 3	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup BKIPM Balikpapan	Produk	15	7
IKK 4	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup BKIPM Balikpapan	UPI	8	7
IKK 5	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Publik di BKIPM Balikpapan	Nilai	64	64
IKK 6	Laporan Usaha Perikanan yang menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan regulasi lingkup BKIPM Balikpapan	Laporan	1	-
IKK 7	Indeks Profesional ASN lingkup BKIPM Balikpapan	Indeks	86	-
IKK 8	Nilai Penilaian Mandiri-SAKIP lingkup BKIPM Balikpapan	Nilai	82	-
IKK 9	Persentase penyelesaian keluhan BPK lingkup BKIPM Balikpapan	%	100	-
IKK 10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM Balikpapan	%	65	50
IKK 11	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BKIPM Balikpapan	Nilai	63,70	-
IKK 12	Nilai Kinerja Anggaran lingkup BKIPM Balikpapan	Nilai	68	-
IKK 13	Tingkat kepatuhan pengadaan barang / jasa lingkup BKIPM Balikpapan	%	80	-
IKK 14	Tingkat kepatuhan pengadaan EMN lingkup BKIPM Balikpapan	%	80	-

Tabel 2. Target Indikator Kinerja Kegiatan BKIPM Balikpapan Triwulan I Tahun 2024

2.3. PENGUKURAN KINERJA

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) diperoleh melalui serangkaian penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dari realisasi IKU, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan Indeks capaian IKU perlu mempertimbangkan jenis polarisasi IKU yang berlaku, yaitu maximize, minimize, dan stabilize.

Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah:

1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah 0;
3. Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda, sebagaimana penjelasan berikut:

a. **Polarisasi Maximize**

Pada jenis polarisasi ini, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi lebih tinggi dari target, dengan formula:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \text{Realisasi} / \text{Target} \times 100\%$$

b. **Polarisasi Minimize**

Pada jenis polarisasi ini, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target, dengan formula:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = (1 + (1 - \text{Realisasi} / \text{Target})) \times 100\%$$

c. **Polarisasi Stabilize**

Pada jenis polarisasi ini, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target.

4. Status indeks capaian IKU adalah sebagai berikut:

BIRU	HIAU	KUNING	MERAH	HITAM
110 - 120	90 - < 110	70 - < 90	50 - < 70	< 50
Istimewa	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA

Secara umum target kinerja Balai KIPM Balikpapan pada triwulan I tahun 2024 telah tercapai, hal ini ditandai dengan Nilai Capaian Organisasi (NKO) sebesar 113,95% dengan kategori istimewa, berdasarkan pelaporan melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja di <https://kinerjaku.kip.go.id>



Gambar 3. Dashboard Capaian IK dan IKU pada Sistem Aplikasi Kinerjaaku

Nilai capaian kinerja merupakan gambaran nilai kinerja Balai KIPM Balikpapan secara keseluruhan. Nilai capaian kinerja triwulan I tahun 2024 sebesar 113,95 %, capaian ini lebih tinggi dari capaian Nilai Kinerja Organisasi Triwulan I tahun 2023 yaitu sebesar 112,21 %.

Rekapitulasi capaian kinerja Balai KPM Balikpapan Triwulan I tahun 2024 secara keseluruhan, dapat dilihat pada Tabel 3.

Kode	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Tahun 2024		
			Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	%
IK 1. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keselamatan Hasil Pekerjaan Secara Profesional dan Partisipatif					
IKK.1	Jumlah sertifikat CCB, standar ISO, sertifikasi lingkup BKPM Balikpapan	Laporan	3	3	100
IKK.2	Unit Pengawasan dan/atau Pengalihan Mutu yang menerapkan Sistem Traceability lingkup BKPM Balikpapan	UPI	1	1	100
IKK.3	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) yang lingkup pada UPI lingkup BKPM Balikpapan	Produk	2	2	100
IKK.4	UPI yang memiliki dokumen Sistem Standar Mutu dan Keselamatan Hasil Pekerjaan lingkup BKPM Balikpapan	UPI	7	7	100
IK 2. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Mutu dan Keselamatan Hasil Pekerjaan Secara Profesional dan Partisipatif					
IKK.6	Misi Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Publik di BKPM Balikpapan	Misi	34	33,16	116,66
IKK.8	Laporan Mutu Partisipatif yang mendapatkan Quality Assurance sesuai metode dalam dan lingkup lingkup BKPM Balikpapan	Laporan	1	1	100
IK 3. TEB KINERJA FEMERMAH YANG BAKI LINGKUP BKPMKP					
IKK.7	Misi Profesional ASN lingkup BKPM Balikpapan	Misi	1	1	100
IKK.8	Misi Pelayanan Masyarakat SAKIP lingkup BKPM Balikpapan	Misi	1	1	100
IKK.9	Pemeriksaan penyelenggaraan urusan BPK lingkup BKPM Balikpapan	%	1	1	100
IKK.10	Revisi/rekomendasi hasil pemeriksaan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKPM Balikpapan	%	100	100	100

Kode	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Tahun 2024		
			Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	%
IKK-11	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inopad BKIPM Balikpapan	Nilai	100	100	100%
IKK-12	Nilai Kinerja Anggaran Inopad BKIPM Balikpapan	Nilai	100	100	100%
IKK-13	Tingkat kepatuhan pengadain barang/jasa Inopad BKIPM Balikpapan	%	100	100	100%
IKK-14	Tingkat kepatuhan pengadain BMN Inopad BKIPM Balikpapan	%	100	100	100%

Tabel 3. Capaian Indikator Kinerja BKIPM Balikpapan Triwulan I Tahun 2024

3.2. ANALISIS DAN EVALUASI

Capaian kinerja berdasarkan sasaran kegiatan secara lebih detail berdasarkan indikator kerjanya serta dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam renstra Balai KIPM Balikpapan, adalah sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan 1 : Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Profesional dan Partisipatif

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif menjadi tolok ukur dalam keberhasilan program dan kegiatan Balai KIPM Balikpapan tahun 2024. Nilai sasaran kegiatan Balai KIPM Balikpapan periode Triwulan I tahun 2024 tersebut adalah 105,00 %.

IKK. 1. Jumlah Sertifikat CPIS Suplier yang diterbitkan

Dalam mendukung kegiatan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dari hulu sampai hilir, maka di tingkat hulu (unit suplier) perlu dilakukan sertifikasi. Sertifikat ini hanya dapat diterbitkan untuk produk perikanan yang telah memenuhi persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada unit suplier sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52/KEP/MEN-2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi. Untuk memastikan bahwa suatu unit suplier menerapkan Program Persyaratan Dasar serta menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan berdasarkan konsep Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) / Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), maka Otoritas Kompetensi melakukan pengendalian melalui kegiatan inspeksi terhadap suplier.

Suplier merupakan salah satu rantai proses hasil kelautan dan perikanan yang berfungsi sebagai pengumpul / pemasok bahan baku ke Unit Pengolahan Ikan (UPI). Penanganan bahan baku hasil perikanan pada unit suplier merupakan salah satu bagian penting dalam pengolahan mutu dan keamanan hasil perikanan. Hal ini dikarenakan, UPI tidak akan dapat menghasilkan produk akhir yang bermutu dan aman jika bahan baku dan suplier tidak sesuai persyaratan mutu dan keamanan.

Pada unit suplier yang dapat memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan melalui penerapan sanitasi / hygiene, sistem rantai dingin (cold chain system) didukung oleh sarana prasarana yang memadai, memiliki personil yang kompeten serta menerapkan HACCP dalam proses produksi dapat diterbitkan sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIS). Penerapan CPIS di unit suplier akan dapat memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang akan berdampak pada nilai tambah dalam perdagangan hasil perikanan.



Gambar 4. Kegiatan Inspeksi / Verifikasi Tautan CPiB di Suplier

Capaian indikator kinerja jumlah sertifikat CPiB supplier yang diterbitkan perhitungannya berdasarkan jumlah suplier yang tersertifikasi CPiB. Capaian indikator kinerja jumlah sertifikat CPiB supplier yang diterbitkan sampai dengan periode Triwulan I tahun 2024 adalah sebanyak 5 laporan atau 120 % dan target sebanyak 4 laporan. Capaian ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan capaian indikator Triwulan I tahun 2023 yaitu 2 laporan.

IKK 2. Unit Penanganan dan / atau Pengolahan Ikan yang menerapkan Sistem Traceability

Indikator pelaku usaha (UPI) yang menerapkan sistem *traceability* diukur dengan menghitung jumlah UPI yang telah menerapkan sistem *traceability* melalui verifikasi penerapan sistem ketertelusuran hasil perikanan.

Pengembangan produk perikanan berbasis sistem ketelusuran (*traceability*) dilakukan untuk mengendalikan mutu pasokan bahan baku olahan dan diversifikasi bahan, serta sertifikasinya guna memenuhi standar mutu dan keamanan produk dari negara mitra atau tujuan ekspor. Melalui penerapan sistem ketelusuran ini, produk perikanan asal Indonesia akan memiliki nilai tambah dan daya saing di pasar global.

Penerapan metode ini dilaksanakan pada Unit Pengolahan Ikan (UPI), terutama

terkait aspek manajemen keamanan bahan pangan, pengkodean informasi produk, pemenuhan persyaratan mutu dan keamanan bahan baku olahan. Penerapan metode ini dilakukan melalui cara:

- a) Diversifikasi produksi perikanan sesuai standar dan nilai tambah pasar dalam negeri dan luar negeri;
- b) Pengembangan sistem informasi terpadu hasil perikanan;
- c) Pengembangan kendali mutu pada pasokan bahan baku olahan;
- d) Penguatan akses masyarakat terhadap kemudahan informasi hasil perikanan.

Sistem ketertelusuran merupakan komponen yang sangat penting dalam sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang sesuai standar internasional. Setiap produk hasil perikanan yang akan didistribusikan kepada konsumen, harus dapat ditelusuri proses dan alurnya mulai dari penyediaan bahan bakunya, pemrosesan, maupun rantai distribusi produknya mulai dari hulu sampai ke hilir.

Tujuan utama penerapan sistem ketertelusuran adalah untuk pengendalian Mutu dan keamanan suatu produk perikanan yang sesuai dengan standar mutu dan keamanan yang diakui secara internasional. Hal tersebut diperlukan agar apabila terjadi pencolakan produk perikanan dari negara tujuan dapat dilakukan penelusuran dengan lebih cepat dan mudah.



Gambar 5: Kegiatan Inspeksi Traceability di Unit Pengolahan Ikan.

Capaian indikator kinerja unit penanganan dan / atau pengolahan ikan yang menerapkan sistem *traceability* perhitungannya berdasarkan jumlah UPI yang telah menerapkan sistem *traceability* dari mendapatkan Surat Keterangan Penerapan Sitem *Traceability*. Capaian indikator kinerja unit penanganan dan / atau pengolahan ikan yang menerapkan sistem *traceability* sampai dengan periode Triwulan I tahun 2024 adalah sebanyak 1 UPI atau 100 % dan target sebanyak 1 UPI. Capaian ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan capaian indikator Triwulan I tahun 2023 yaitu sebanyak 0 UPI.

IKK. 3. Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) Ruang Lingkup Produk Pada UPI

Dalam rangka pemenuhan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, maka Pelaku Usaha pada setiap Unit Pengolahan Ikan (UPI) wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJM-KHP) sejak pra produksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.

Sebagai bentuk pengendalian terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang dilakukan oleh UPI maka BPPMHPK selaku Otoritas Kompetensi menerbitkan Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu / Hazard Analysis and Critical Control Point yang selanjutnya disebut sebagai Sertifikat Penerapan PMMT / HACCP. Sertifikat Penerapan PMMT / HACCP merupakan sertifikat yang diberikan kepada Pelaku Usaha industri pengolahan ikan yang telah memenuhi dan menerapkan SJM-KHP pada rangkaian proses produksinya. Persyaratan SJM-KHP meliputi program persyaratan dasar (PPD), persyaratan sistem HACCP dan persyaratan sistem ketelusuran di UPI.

Sertifikat Penerapan PMMT / HACCP diberikan berdasarkan jenis olahan ikan, unit proses, dan / atau potensi bahaya (*hazard*) yang berbeda yang ditangani dan / atau diolah oleh UPI. Sertifikat Penerapan PMMT / HACCP merupakan kelulusan dan kegiatan penilaian kesesuaian melalui inspeksi penerapan persyaratan SJM-KHP dan pemeriksaan tindakan perbaikan terhadap setiap ketidaksesuaian di UPI sesuai dengan ruang lingkup yang di sertifikasi.

Inspeksi penerapan PMMT / HACCP dilaksanakan melalui mekanisme inspeksi di tempat (*On Site Visit*) dan inspeksi jarak jauh (*Remote Inspection*). Hasil inspeksi dievaluasi oleh tim teknis untuk mendapatkan rekomendasi pemenuhan persyaratan SJMKHP yang dilakukan oleh UPI.

Sertifikasi penerapan HACCP pada Unit Pengolahan Ikan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan. Tata Cara sertifikasi penerapan HACCP mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 51/PERMEN-KP/2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan, Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu / *Hazard Analysis Critical Control Point* serta Keputusan Kepala Badan KIPM Nomor 32-Tahun 2023 tentang Pelunjuk Pelaksanaan Sertifikasi Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu / *Hazard Analysis Control Point*.

Indikator kinerja sertifikasi HACCP ruang lingkup produk di Unit Pengolahan Ikan diukur dengan menghitung jumlah ruang lingkup produk yang telah tersertifikasi HACCP, baik itu permohonan baru, penambahan ruang lingkup ataupun perpanjangan yang diterbitkan pada tahun berjalan serta verifikasi terhadap UPI yang telah memiliki Sertifikat HACCP melalui kegiatan monitoring dan evaluasi untuk menjamin komitmen dan efektivitas penerapan HACCP dalam rangka memenuhi persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada kegiatan penanganan dan/atau pengolahan di UPI.

Pada periode Triwulan I tahun 2024 capaian indikator kinerja sertifikasi *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI adalah sebanyak 7 ruang lingkup produk dan target 7 ruang lingkup produk. Dibandingkan capaian Triwulan I tahun 2023 yaitu sebanyak 3 ruang lingkup produk, capaian indikator kinerja sertifikasi HACCP ruang lingkup produk pada UPI periode Triwulan I tahun 2024 mengalami peningkatan.

Ruang lingkup produk yang dijamin melalui sertifikasi HACCP periode Triwulan I tahun 2024 disajikan sebagai berikut :

1. PT. Ocean Paradise Fishery, Grade B sebanyak 2 ruang lingkup produk
2. CV. Tiga A Unit Manggar, Grade B sebanyak 4 ruang lingkup produk
3. CV. Multi Sakana Jaya, Grade B sebanyak 1 ruang lingkup produk



Gambar 5. Kegiatan Inspeksi / Monitoring dan Evaluasi Penerapan HACCP di UPI

IKK. 4. UPI yang Konsisten Menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Unit Usaha Perikanan yang memenuhi persyaratan ekspor merupakan unit usaha yang telah menerapkan prinsip-prinsip HACCP. Pada unit usaha yang telah tersertifikasi HACCP dilakukan verifikasi terhadap pelaksanaan SSOP / GMP dan penerapan HACCP dengan waktu pelaksanaan sesuai dengan grade HACCP UPI.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa UPI tersebut secara konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan.

Indikator UPI yang konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan diukur dengan menghitung jumlah UPI yang konsisten dalam penerapan HACCP dan dibuktikan pada saat verifikasi penilaian konsistensi penerapan HACCP (surveilan). Realisasi indikator kinerja UPI yang konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada periode I tahun 2024 mencapai 7 UPI dengan prosentase 100 % dari target yang ditetapkan pada Triwulan I tahun 2024 sebanyak 7 UPI. Capaian indikator kinerja UPI yang konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan periode Triwulan I tahun 2024 memiliki capaian yang sama bila dibandingkan capaian Triwulan I tahun 2023 yaitu sebanyak 7 UPI.



Gambar 7. Surveilan Konsistensi Penerapan HACCP di UPI

Tercapainya realisasi UPI yang konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan merupakan komitmen bersama antara Balai KIPM Balikpapan dan stakeholder dalam rangka memenuhi jaminan mutu dan melengkapi persyaratan ekspor dari negara tujuan sesuai dengan amanat perundang-undangan.

Sasaran Kegiatan 2 : Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Professional dan Partisipatif

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif menjadi tolok ukur dalam keberhasilan program dan kegiatan Balai KIPM Balikpapan tahun 2024. Nilai sasaran kegiatan Balai KIPM Balikpapan Triwulan I tahun 2024 tersebut adalah 110,86 %. Indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif adalah :

1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat layanan publik
2. Lokasi usaha perikanan yang menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan regulasi

Kode	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2023		Tahun 2024		Rencana 2023 - 2024	
		Realisasi Triwulan I	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	(%)	Target	(%)
IKK 2. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Professional dan Partisipatif							
IKK 2.1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Layanan Publik di BKIPM Balikpapan	88,37	84	92,56	110,86	84	110,86
IKK 2.2	Lokasi Usaha Perikanan yang menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan regulasi tingkat BKIPM Balikpapan	0	0	0	0	2	0

Tabel 5. Capaian Sasaran Kegiatan 2 Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan

IKK 2.1 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Layanan Publik Lingkup BKIPM Balikpapan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur

penyelenggara pelayanan publik. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BKIPM menggunakan elektronik SKM (e-survey SKM), masyarakat / pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat <https://ntsp.kbp.go.id/skm/>. Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat di akses oleh kepada pengguna jasa di masing masing 47 UPT. Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, jangka waktu penyelesaian pelayanan, biaya jasa pelayanan, produk pelayanan, kecepatan respon dari aplikasi sistem pelayanan, kemudahan dalam penggunaan fitur aplikasi sistem layanan, kualitas isi / konten aplikasi sistem layanan dan layanan konsultasi dan pengaduan. Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuesioner dari UPT lingkup BKIPM.

Nilai SKM dihitung dengan menggunakan "Nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan Indeks kepuasan masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Bobot Nilai Rata-rata Tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0.11$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

IKM	=	$\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Unsur Yang Terisi}}$	X Nilai Penimbang Total
------------	---	---	-------------------------

Untuk memudahkan interpretasi penilaian SKM yaitu antara 25 – 100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{SKM Unit Pelayanan} \times 25$$

Nilai Persepsi	Nilai Interval SKM	Nilai Interval Konversi SKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,69	D	Tidak Baik
2	2,60 - 3,054	65,00 - 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0544 - 3,632	78,51 - 88,30	B	Baik
4	3,532 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat Baik

Tabel 6. Nilai Persepsi, Nilai Interval SKM, Nilai Interval Konversi SKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas 9 unsur pelayanan diperoleh hasil skor Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebesar 88,15 maka kinerja unit pelayanan ini berada dalam mutu pelayanan A dengan kategori SANGAT BAIK, karena masih berada dalam Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval konversi Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan 88,31 - 100,00. Capaian Indikator Kinerja nilai kepuasan masyarakat terhadap proses layanan dari Balai KIPM Balikpapan sampai dengan Triwulan I tahun 2024 sebesar 88,15 atau dengan persentase sebesar 118,65 % dari target yang ditetapkan yaitu 84. Dibandingkan capaian Triwulan I tahun 2023 dengan nilai 86,37, capaian indikator kinerja Survei Kepuasan Masyarakat layanan publik lingkup BKPM Balikpapan periode Triwulan I tahun 2024 memiliki capaian yang lebih meningkat.

No.	Unsur SKM	Nilai Rata-rata
1	Kesesuaian persyaratan pelayanan	3,87
2	Kemudahan prosedur pelayanan	3,97
3	Kesesuaian jangka waktu penyelesaian pelayanan	3,87
4	Kesesuaian biaya jasa pelayanan	3,95
5	Kesesuaian produk pelayanan	3,97
6	Kecapatan respon (membuka halaman, konten, pembelian informasi, unduh / unggah) dan aplikasi sistem pelayanan	3,87

No.	Unsur SKM	Nilai Rata-rata
A	Kemudahan dalam penggunaan fitur aplikasi sistem layanan	3,97
B	Kualitas isi / konten aplikasi sistem layanan	3,97
C	Layanan konsultasi dan pengaduan	3,97
Rata-rata		3,54

Tabel 7. Nilai Rata-rata (NRR) Hasil Survei Kepuasan Masyarakat

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tercapainya indikator kinerja nilai capaian pada survei kepuasan masyarakat (SKM) antara lain :

- Proses pelayanan yang sesuai dengan keinginan pelaku usaha
- Sosialisasi terhadap pengguna jasa sehingga memahami proses bisnis dan standar operasional standar pada bisnis proses Balai KIPM Balikpapan.
- SDM / Petugas layanan yang sehandlas melayani dengan dedikasi dan etos kerja yang tinggi

Dari hasil evaluasi pelaksanaannya proses pencapaian terhadap indikator kinerja tersebut dapat konsisten tercapai, dipengaruhi beberapa faktor, antara lain :

- Komitmen terhadap janji layanan
- Pendidikan dan pelatihan pelayanan prima untuk petugas layanan
- Dukungan sarana dan prasarana layanan
- Sosialisasi terhadap proses pengisian indeks kepuasan masyarakat

Berdasarkan hasil penilaian SKM dapat disimpulkan bahwa penilaian masyarakat dalam unsur pelayanan secara umum adalah sangat baik. Namun kualitas pelayanan perlu terus ditingkatkan terutama unsur pelayanan yang memperoleh nilai lebih rendah, agar nilai SKM yang diperoleh dapat dipertahankan atau lebih ditingkatkan lagi sehingga dapat memberikan pelayanan yang memuaskan untuk pelanggan / stakeholder.

IKK 6. Laporan Usaha Perikanan Yang Menerapkan Quality Assurance Sesuai Standar Sistem dan Regulasi Lingkup BKIPM Balikpapan

BPPMHKP sebagai frontes kompeten untuk melakukan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan sesuai regulasi dan standar yang berlaku secara nasional maupun internasional, dalam kegiatan program unggulan di bidang perikanan dan kelautan berkaitan dengan produk unggulan sektor kelautan dan perikanan. BPPMHKP berperan sebagai Quality Assurance (QA) yaitu penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan sejak ikan dibudidayakan untuk produk perikanan budidaya dan sejak ikan ditangkap di atas kapal untuk produk perikanan memenuhi standar yang diakui secara internasional.

Pada tahun 2024 BKIPM Balikpapan membuat target indikator kinerja lokasi usaha perikanan yang menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan regulasi sebanyak 1 laporan dengan perhitungannya capaian indikator kinerja lokasi usaha perikanan yang menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan regulasi per tahunannya.

Sasaran Kegiatan 3: Tatakelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup BPPMHKP

Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik menjadi tolok ukur dalam keberhasilan program dan kegiatan Balai KIPM Balikpapan tahun 2024. Nilai sasaran kegiatan tata kelola pemerintahan yang baik Balai KIPM Balikpapan periode Triwulan I tahun 2024 tersebut adalah 100,00 %. Indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik adalah :

1. Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM Balikpapan
2. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup BKIPM Balikpapan
3. Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BKIPM Balikpapan
4. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM Balikpapan
5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BKIPM Balikpapan
6. Nilai Kinerja Anggaran lingkup BKIPM Balikpapan
7. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup BKIPM Balikpapan
8. Tingkat kepatuhan BMN lingkup BKIPM Balikpapan

Kode	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2023	Tahun 2024			Rencana 2024 - 2024	
		Realisasi Triwulan	Target Triwulan	Realisasi Triwulan	(%)	Target	(%)
SK 3. Tiga Milia Pemerintah Yang Baik Lingkup BKIPM							
IKK.7	Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM Balikpapan		7	7	7	64	7
IKK.8	Nilai Poinjari Monevii BKIPD lingkup BKIPM Balikpapan		100	100	100	68	100
IKK.9	Persentase penyelesaian keluhan DPRK lingkup BKIPM Balikpapan		100	100	100	40,5	100
IKK.10	Persentase rekomendasi hasil pengabdian yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM Balikpapan	100	50	100	100	15	100
IKK.11	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (KPA) lingkup BKIPM Balikpapan		100	100	100	69	100
IKK.12	Nilai Kinerja Anggaran lingkup BKIPM Balikpapan		100	100	100	68	100
IKK.13	Tingkat kepatuhan pengabdian (komit) jasa lingkup BKIPM Balikpapan		100	100	100	77,9	100
IKK.14	Tingkat kepatuhan pengabdian BNN lingkup BKIPM Balikpapan		100	100	100	77,9	100

Tabel 7. Capaian Sasaran Kegiatan 3 Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan

IKK. 7. Indeks Profesional ASN Lingkup BKIPM Balikpapan

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedispilinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018). Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KIP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Untuk menghitung indeks profesionalitas ASN ini digunakan rumus sebagai berikut:

1. Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:

(Kualifikasi b, Kompetensi c, Kinerja d, Disiplin)

2. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat Pendidikan formal terakhir yang telah dibayar, meliputi :
- a. Pendidikan S-3 (Strata-Tiga)
 - b. Pendidikan S-2 (Strata-Dua)
 - c. Pendidikan S-1 (Strata-Satu) / D-4 (Diploma-Empat)
 - d. Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga) / SM (Sarjana Muda)
 - e. Pendidikan D-1 (Diploma-Satu) / D-2 (Diploma-Dua) / SLTA Sederajat
 - f. Pendidikan di bawah SLTA dengan formula sebagai berikut :

Nilai	Nama Kualifikasi	Nilai Kualifikasi
5	Pendidikan S3	25
4	Pendidikan S2	20
3	Pendidikan S1	15
2	Pendidikan D III / SM	10
1	Pendidikan D II / SMA	5
0	Pendidikan SMP / SD	1

3. Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi :
- Diklat Kepemimpinan, Diklat fungsional / Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan seminar / workshop / konferensi / setara satu tahun terakhir dengan formula sebagai berikut :

Nilai	Nama Kompetensi	Nilai Kompetensi Sesuai Jabatan		
		Kompetensi Struktural	Kompetensi Jabatan	Kompetensi Soft
	Diklat Struktural	15	-	-
1	Pernah ikut Diklat PIM pada levelnya	15	-	-
0	Tidak pernah ikut Diklat PIM pada levelnya	0	-	-
	Diklat Fungsional	-	15	-
1	Pernah ikut Diklat Fungsional	-	15	-
0	Tidak pernah ikut Diklat Fungsional	-	0	-

Nilai	Nama Kompetensi	Nilai Kompetensi Sesuai Jabatan		
		Kompetensi Struktural	Kompetensi Jalinan	Kompetensi Staf
	Diklat 20 JP	15	15	22.5
1	Pernah ikut diklat 20 JP dalam tahun terakhir	15	15	22.5
0	Tidak pernah ikut diklat 20 JP dalam tahun terakhir	0	0	0
	Seminar	10	10	17.5
1	Pernah ikut seminar	10	10	17.5
0	Tidak pernah ikut seminar	0	0	0
Total		40	40	40

4. Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi :
- Sasaran Kerja Pegawai (SKP),
 - Perilaku Kerja dengan formula sebagai berikut :

No	Kelompokan Nilai SKP	Nilai SKP	Nilai Kinerja
1	Sangat Baik	81 - ke atas	30
2	Baik	76 - 80	25
3	Cukup	61 - 75	15
4	Kurang	51 - 60	5
5	Buruk	50 - ke bawah	1

5. Disiplin diukur dari indikator riwayat penjetuhan hukuman disiplin yang pernah dialami yang meliputi :
- Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, dan
 - Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat) dengan formula sebagai berikut :

Nilai	Nilai Hukuman Disiplin	Nilai Disiplin
0	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin	5
R	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan	3
S	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang	2
B	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat	1

6. Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi meliputi :
- Kualifikasi, dihitung dari kondisi tingkat Pendidikan terakhir dan pegawai dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah di Update pada aplikasi SIMPEG Online KKP.
 - Kompetensi, diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Perhitungan nilai Diklat PIM, Diklat Fungsional / Teknis, Diklat 20 JP dan seminar diwajibkan sesuai tingkat jabatannya.
 - Pejabat Struktural wajib sudah melaksanakan Diklat PIM sesuai dengan level terakhirnya, Diklat 20 JP dan Seminar dalam satu tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40.

Perhitungan capaian Indikator Indeks Profesionalitas ASN Balai KIPM Balikpapan tahun 2024 dirakun secara tahunan.

IKK. 8. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup BKIPM Balikpapan

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Usaha-usaha penguatan akuntabilitas kinerja dan sekaligus peningkatannya, dilakukan antara lain melalui Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Evaluasi dan penilaian SAKIP dilakukan atas komponen-komponen SAKIP sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pandalayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Rekonsiliasi kinerja merupakan indikator yang menunjukkan keselarasan antara dokumen Laporan Kinerja (LKJ), Target Kinerja dan Cara Pencapaian Kinerja dari masing-masing indikator yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja. Nilai

Rekonsiliasi Data Kinerja dilakukan pada 3 (tiga) aspek yaitu :

1. Aspek kepatuhan : Aspek kepatuhan dilakukan dengan melakukan penilaian pada ketersediaan dokumen yang dibutuhkan yang meliputi : PK, Manual IKU, Rincian Target IKU, Renaksi LKJ / LOK TW I s.d. III dan data dukung LKJ / LOK TW III
2. Aspek kesesuaian : Aspek kesesuaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai kesesuaian dokumen pada kriteria kesesuaian target, kesesuaian realisasi dan kesesuaian informasi data.
3. Aspek ketertepatan : Aspek ketertepatan dilakukan dengan melihat rata-rata nilai pencapaian IKU + IK pada TW I, TW II dan TW III Tahun 2024 pada aplikasi Kinerjaaku.

Perhitungan capaian indikator kinerja nilai rekonsiliasi kinerja satker Balai NPM Balikpapan Tahun 2024 dilakukan secara tahunan.

IKK. 9. Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup BKIPM Balikpapan

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan adalah merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Kategori opini terhadap laporan keuangan Kementerian / lembaga yang diberikan oleh BPK, yaitu :

SKALA	OPINI
5	WTP: Wajar Tanpa Pengecualian
4	WTP-DPP: Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf
3	WDP: Wajar Dengan Pengecualian
2	Tidak Wajar
1	TME: Tidak Menyatakan Pendapat

Keterangan: Penilaian atas laporan keuangan merupakan hasil evaluasi dari laporan keuangan tahun sebelumnya.

IKK. 10. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BKIPM Balikpapan

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan internal Balai KIPM Balikpapan yang sudah ditindaklanjuti (proses dan / atau tuntas) yang menjadi objek pengawasan dengan pengukuran target kumulatif tahunan sebesar 80 % pada tahun 2024. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Balikpapan adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun Bab) yang terbit pada Triwulan IV 2023 sampai dengan Triwulan III 2024 dan telah ditindaklanjuti (berstatus tuntas).

Capaian indikator kinerja presentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Balai KIPM Balikpapan pada periode Triwulan I tahun 2024 adalah 100 % dari target sebesar 80 %, yang diperoleh dari hasil tindak lanjut atas laporan hasil pengawasan (LHP) Isen KKP melalui aplikasi SIDAK KKP yang diterbitkan sampai dengan triwulan IV tahun 2022 dengan tindak lanjut rekomendasi LHP yang berstatus tuntas.



Gambar 8. Tangkap Layar Aplikasi SIDAK Triwulan I Tahun 2024

IKK. 11. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BKIPM Balikpapan

IKPA adalah indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dan sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Nilai ini diperoleh dari data input dan output satker didalam aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan. Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-4/PS/2020 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, terdapat reformulasi indikator capaian output yaitu adanya perubahan nomenklatur dari Konfirmasi capaian output menjadi capaian output. Perhitungan capaian output ini dihitung berdasarkan rasio antara capaian RO dengan target RO. Selain itu, juga terdapat penyesuaian bobot 13 (tiga belas) indikator IKPA sebagai berikut : Revisi DIPA; Devisi halaman III DIPA; Pagu minus; data kontrak; pengelolaan UP TUP, UPJ bendahara; Dispensasi SPM; Penyerapan; penyelesaian tagihan; Capaian output; Retur SP2D; Kesalahan SPM; dan perencanaan Kas.

Pengawasan pengelolaan kinerja keuangan yang meliputi nilai IKPA dipengaruhi oleh ketaatan terhadap peraturan pengelolaan keuangan, kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta aktivitas pengelolaan uang. Adapun elemen pengelolaan kinerja keuangan satuan kerja yang mempengaruhi nilai IKPA adalah sebagai berikut :

1. Revisi DIPA, dapat melakukan revisi secara efektif
2. Revisi Halaman III DIPA, dapat dilakukan penghitungan rencana penarikan dana seakurat mungkin, karena rencana penarikan dana pada halaman III DIPA akan menjadi dasar pembuatan perkiraan pencarian dana harian.
3. Pagu Minus, dapat mengantisipasi dan menyelesaikan pagu minus secepat mungkin.
4. Menyampaikan data kontrak secara tepat waktu (maksimal 5 hari kerja setelah kontrak ditandatangani).
5. Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP), Uang Persediaan (UP) minimal direvolving satu bulan sekali atau dapat juga dilakukan berkali-kali dan tidak boleh tertambat, sedangkan pengelolaan Tambahan Uang

- Persediaan (TUP) dipertanggungjawabkan satu bulan sesuai dengan surat pernyataan dan tidak ada sisa yang dikembalikan/disator.
6. Rekon Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Rekon disampaikan ke KPPN secara tepat waktu (paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya)
 7. Dispensasi SPM, berusaha dapat menghindari dispensasi SPM
 8. Penyerapan Anggaran, mengeksekusi anggaran secara proposional sesuai target penyerapan anggaran.
 9. Penyelesaian tagihan, dapat memastikan ketepatan waktu penyelesaian tagihan SPM-LS Non Belanja Pegawai (maksimal 17 hari kerja sejak terma penyelesaian pekerjaan).
 10. Konfirmasi Capaian Output, disampaikan setelah 10 hari bulan berikutnya bertujuan untuk mewujudkan belanja berkualitas sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dan dipergunakan dalam rangka penulisan kinerja anggaran.
 11. Retur SP2D yang diakibatkan kesalahan penulisan rekening/ rekening tidak aktif Halaman III DIPA untuk meningkatkan akurasi pelaksanaan sesuai dengan perencanaan.
 12. Reklasifikasi akurasi perencanaan kas agar menjadi perhatian dan disampaikan ke KPPN sebelum jatuh tempo perencanaan kas tersebut yaitu sebelum sebelumnya jatuh tempo RPD harian pada pukul 12.00.
 13. Masalah SPM yang diakibatkan kurang telitian, sehingga tidak dapat di proses oleh sistem KPPN.

Penghitungan capaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Balai KIPM Balikpapan Tahun 2024 dilakukan per semester.

IKK. 12- Nilai Kinerja Anggaran Lingkup BKIPM Balikpapan

Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran Kementerian / Lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran. Kinerja anggaran mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga.

Nilai kinerja anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Penilaian kinerja dilakukan dengan menghitung nilai kinerja atas aspek implementasi dan nilai kinerja atas aspek manfaat dikalikan dengan bobot masing-masing aspek berkenaan. Selanjutnya, Nilai Kinerja (NK) untuk pelaksanaan program dihitung dengan menjumlahkan perkalian nilai aspek implementasi dan aspek manfaat dengan bobot masing-masing.

Target yang ditetapkan untuk nilai kinerja anggaran tahun 2024 adalah Baik (85) sedangkan pengukuran capaiannya dilakukan tahunan pada aplikasi Online Monitoring SMART-DJA.

IKK. 13. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang / Jasa Lingkup BKIPM Balikpapan

Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang / Jasa lingkup BKIPM Balikpapan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nilai Tingkat kepatuhan pengadaan barang / jasa lingkup BKIPM Balikpapan diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur sebagai berikut :

1. Ketersediaan manajemen risiko pengadaan barang / jasa strategis (10 %)
2. Perencanaan dan persiapan pengadaan (15 %)
3. Persentase pemilihan penyedia barang / jasa yang dilaksanakan melalui SPSE (10%)
4. Laporan penyelenggaraan pengadaan barang / jasa (5 %)
5. Kesesuaian tahapan pelaksanaan (45 %)
6. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pengadaan barang / jasa lingkup Eselon I Triwulan I sampai dengan Triwulan III Tahun 2023 (15 %)

Pengukuran capaian indikator kinerja tingkat kepatuhan pengadaan barang / jasa dilaksanakan per tahun.

IKK. 14. Tingkat Kepatuhan BMN Lingkup BKIPM Balikpapan

Kegiatan pengelolaan BMN lingkup BKIPM Balikpapan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nilai Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut yaitu :

1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2024. (bobot 12,5%)
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST-hingga Triwulan III Tahun 2024 baik ke pengguna barang dan pengelola barang. (bobot 25 %)
3. Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi rusak berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2024. (bobot 25 %)
4. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2024 didukung Berita Acara Serah Terima (BAST) / Berita Acara Pemakaian (bobot 25 %)
5. Penyusunan / penyampaian Laporan BMN (Semester dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 12,5 %)

Indikator Kinerja tingkat kepatuhan pengelolaan BMN tahun 2024 pengukurannya dilaksanakan secara tahunan.

3.3. REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran Balai KIPM Balikpapan pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 10.728.082.000,-. Anggaran Balai KIPM Balikpapan tahun 2024 telah mengalami perubahan atau revoli sebesar Rp. 4.311.582.000,- disebabkan perubahan organisasi dengan perpindahan 28 orang pegawai ke Badan Karantina Indonesia dan pagu anggaran sebesar Rp. 10.728.082.000,- menjadi Rp. 6.416.500.000,- serta pemblokiran anggaran sebesar Rp. 435.500.000,- sehingga alokasi anggaran yang bisa digunakan setelah blokir adalah Rp. 5.980.000.000,-. Penyerapan anggaran Balai KIPM Balikpapan sampai dengan Triwulan I Tahun 2024 adalah Rp. 1.528.872.881,- atau sebesar 23,79% dari pagu anggaran yang tersedia.

Anggaran ini digunakan dalam rangka pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja. Hal ini dibuktikan dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 113,95 %, dimana Nilai Kinerja Organisasi (NKO) ini merupakan gambaran nilai kinerja suatu organisasi secara keseluruhan.

Rekapitulasi penyerapan anggaran Balai KIPM triwulan I tahun 2024 berdasarkan jenis belanja dan jenis kegiatan dapat dilihat pada Tabel 8 dan Tabel 9.

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	3.322.202.000	1.093.165.913	32,90
2	Belanja Barang	3.094.298.000	433.508.788	14,01
3	Belanja Modal	0	0	0
	Total	6.416.500.000	1.526.672.681	23,79

Tabel 8. Penyerapan Anggaran Per Jenis Belanja Triwulan I Tahun 2024

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
1	Pengendalian Mutu	210.850.000	31.400.793	14,89
2	Standarisasi Sistem dan Keperluan	436.500.000	0	0
3	Dukungan Manajemen Internal Lingkup BIPM/BIP	5.769.150.000	1.495.271.888	25,91
	Total	6.416.500.000	1.526.672.681	23,79

Tabel 9. Penyerapan Anggaran Berdasarkan Kegiatan Triwulan I Tahun 2024

3.4. EFISIENSI PELAKSANAAN ANGGARAN

Pengukuran efisiensi pelaksanaan anggaran dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi lembaga dalam mencapai target yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan alokasi anggaran yang digunakan. Balai KIPM Balikpapan telah melakukan upaya-upaya optimalisasi dan efisiensi sumber daya dengan memaksimalkan SDM dan waktu kerja. Sumber efisiensi anggaran terutama berasal dari efisiensi pelaksanaan anggaran dan efisiensi pelaksanaan tugas. Kebijakan terkait efisiensi anggaran tersebut mendorong Balai KIPM Balikpapan untuk lebih efisien dan fokus dalam pelaksanaan tugas fungsi pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan namun tetap menjaga kualitas kinerja.

Berdasarkan capaian indikator kinerja kegiatan pada Triwulan I tahun 2024, penyerapan anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan telah tercapai sesuai dengan yang ditargetkan. Dari hasil pelaksanaan kegiatan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengukuran capaian indikator kinerja kegiatan Triwulan I Tahun 2024 telah tercapai dengan adanya dukungan Anggaran DIPA BKIPM Balikpapan Tahun 2024.
2. Ada beberapa kegiatan yang capaian melebihi target dengan dukungan anggaran yang tersedia.
3. Capaian realisasi anggaran Triwulan I Tahun 2024 berdasarkan OMSPAN adalah Rp. 1.526.672.881,- atau sebesar 23,78 % dari pagu anggaran Rp. 6.416.500.000,-.

BAB. IV. PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKJ) Balai KIPM Balikpapan Triwulan I tahun 2024 menyajikan capaian sasaran strategis yang tercermin dalam capaian indikator kinerja Balai KIPM Balikpapan Tahun 2024. Capaian tersebut dilakukan perbandingan terhadap target tahun berjalan, tahun sebelumnya dan juga target Renstra 2020-2024 sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam perencanaan program dan kegiatan berikutnya. Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja BKIPM Balikpapan Triwulan I tahun 2024 dapat disimpulkan beberapa hal antara lain :

1. Nilai capaian indikator kinerja Balai KIPM Balikpapan periode triwulan I tahun 2024 adalah sebesar 113,95 % yang dapat dilihat pada aplikasi kinerjaku di <https://kinerjaku.kip.go.id>
2. Pencapaian kinerja Balai KIPM Balikpapan periode Triwulan I tahun 2024 sudah sangat baik dengan diperolehnya Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 113,95% pada aplikasi kinerjaku.
3. Capaian Indikator Kinerja Triwulan I tahun 2024, sebanyak 6 indikator kinerja capaiannya telah memenuhi / melebihi target.
4. Restisiasi penyerapan anggaran Balai KIPM Balikpapan pada Triwulan I tahun 2024 mencapai Rp. 1.528.872.681,- atau sebesar 23,79 % dari pagu anggaran Rp. 6.419.500.000,-.
5. Untuk meningkatkan nilai efisiensi pada triwulan berikutnya maka Balai KIPM Balikpapan perlu melakukan optimalisasi dan efisiensi sumberdaya dengan memaksimalkan sumberdaya manusia, waktu kerja dan anggaran kegiatan.

4.2. REKOMENDASI

Berdasarkan analisis dan evaluasi kinerja Balai KIPM Balikpapan pada Triwulan I tahun 2024 sebagai upaya untuk peningkatan kinerja pada tahun berikutnya, terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dan ditindaklanjuti sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja dengan memanfaatkan data realisasi tahun sebelumnya sebagai dasar penentuan target tahun berikutnya. Penyusunan kegiatan dan anggaran diintegrasikan dengan penentuan target kinerja, sehingga dapat menggambarkan pelaksanaan kegiatan dan anggaran berbasis kinerja;
2. Melakukan perbaikan / tindak lanjut terhadap aspek-aspek yang dinilai kurang pada pelaksanaan kegiatan;
3. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi kinerja yang dilakukan secara periodik dan terstruktur agar pelaksanaannya lebih efektif dan efisien;
4. Laporan pencapaian kinerja ini digunakan sebagai dasar penyusunan perencanaan kinerja tahun berikutnya, sehingga diharapkan dapat memberikan peningkatan kinerja berorientasi hasil yang lebih optimal.

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 18
JAKARTA 10113, KOTAK POS 4130 JKP 50041
TELEPON (021) 3510070 (LACUNG), FAKSIMILE (021) 3510252
LAMAY www.kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI KIPM BALIKPAPAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Eko Sulystianto**
Jabatan : **Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Balikpapan**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ishartini**
Jabatan : **Pt. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 16 Januari 2024

Pihak Kedua

Pt. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan


Ishartini

Pihak Pertama

Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Balikpapan


Eko Sulystianto

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI KIPM BALIKPAPAN**

SA SARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
Kegiatan 1. Pengendalian Mutu				
SK1.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Profesional dan Partisipatif	1	Jumlah sertifikat CPIS suplier yang diterbitkan lingkup BKIPM Balikpapan (laporan)	10
		2	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup BKIPM Balikpapan (UPI)	3
		3	Sertifikas Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup BKIPM Balikpapan (Produk)	15
		4	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup BKIPM Balikpapan (UPI)	0
Kegiatan 2. Standardisasi Sistem dan Kepetuhan				
SK2.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Profesional dan Partisipatif	5	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di BKIPM Balikpapan (Nilai)	84
		6	Laporan Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup BKIPM Balikpapan (Laporan)	1
Kegiatan 3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM				
SK3.1	Terkelola Pemerintah yang Baik Lingkup BPPMHP	7	Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM Balikpapan (Indeks)	88
		8	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup BKIPM Balikpapan (Nilai)	82
		9	Persentase Penyelesaian Tamuan BPK lingkup BKIPM Balikpapan (%)	100
		10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM Balikpapan (%)	80
		11	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKRA) lingkup BKIPM Balikpapan (Nilai)	83.78

	12	Nilai Kinerja Anggaran lingkup BKIPM Balikpapan (Nilai)	85
	13	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup BKIPM Balikpapan (%)	80
	14	Tingkat kepatuhan SIMN lingkup BKIPM Balikpapan (%)	80

Data Anggaran

NO	KINDENTAN DASAR KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	
	Pengendalian Mutu	210.850.000
2.	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
	Standarisasi Sistem dan Kepatuhan	435.500.000
3.	Program Dukungan Manajemen	
	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	5.769.150.000
Total Anggaran Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Balikpapan Tahun 2024		6.415.500.000

Jakarta, 15 Januari 2024

Pihak Kedua

Pit. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan



Ishartini

Pihak Pertama

Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Balikpapan



Eko Sulystianto

LAPORAN SERTIFIKASI CPIB SUPPLIER

CVT KPM
REVISI 1

Buku KPIB Berbasis
Tahun 2024

No.	Nama Suplier	Jenis Olahan (Sejor, Beku, Olahan)	Alamat	Provinsi	Klasifikasi (Sangat Baik, Baik, Cukup)	No. Sertifikat CPB	Tanggal Terbit	Berlaku Sampai Dengan	UPTI Yang Di Suplai	Keterangan
(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	(VI)	(VII)	(VIII)	(IX)	(X)	(XI)
1	PT. Lings Anada Cagang Indonesia	Sejor	Jl. Gang Dermaga 2, Kel. Senayan, Kec. Tanah Abang, Kab. Bekasi, Kalimantan Timur, Indonesia	Bengkulu	Cukup	003/CPB/01/2023	20 Maret 2023	31 Maret 2027	PT. Nisaha Sejor	Verifikasi Tahunan
2	PT. Surya Kabin	Sejor	Jl. Merdeka No. 00 RT. 008, Kel. Sungai Meranti, Kec. Anggana, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur	Utara	Baik	003/CPB/01/2023	1 Maret 2023	1 Maret 2027	PT. Surya Surya Mandiri	Verifikasi Tahunan
3	CV. OSA Sunda Kompartemen	Sejor	Jl. Banjar No. 38, Ka. Manggar Baru, Kel. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Prov. Kalimantan Timur	Utara	Baik	003/CPB/01/2023	14 Maret 2023	14 Maret 2027	CV. Tigo A	Verifikasi Tahunan
				Kalimantan	Baik	004/CPB/01/2023	14 Maret 2023	14 Maret 2027	CV. Tigo B	
				Kalimantan	Baik	005/CPB/01/2023	14 Maret 2023	14 Maret 2027	CV. Tigo C	
4	CV. OSA Sunda Kompartemen	Sejor	Jl. Banjar No. 06, Kel. Manggar Baru, Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Prov. Kalimantan Timur	Bengkulu	Baik	004/CPB/01/2023	3 Maret 2023	3 Maret 2027	CV. Tigo A	Inspeksi

iii.	UD Sahabat Negeri Paksi	Caya	J. Peraturan No. 363 Mangga Bayu, Kel. Belitang Timur, Belitang, Kalimantan Timur- Indonesia	Iran Pelagi	Celup	006/CPD/SH/2023	20 Maret 2023	20 Maret 2027	Cv. Tjs A	sertifikat Tahunan
				Iran Zennati	Celup	027/CPD/SH/2023	20 Maret 2023	20 Maret 2027	Cv. Tjs A	



Belitang, 01 April 2023
 Kepala Seksi Perizinan

Andi Englaro, S.P., M.Si

**UNIT PENANGANAN DAN / ATAU PENGOLAHAN IKAN YANG MENERAPKAN SISTEM TRACEABILITY
LINGKUP BKIPM BALIKPAPAN**

Nama UPT: : Balai KIPM Balikpapan
 Triwulan: : Triwulan I Tahun 2024

NO	Nama UPT	Jesamut	Peringkat / Grade	Jenis Produk	Tanggal Inspeksi	Klasifikasi
1	2	3	4	5	6	7
1	PT. Sampo Odeah Nauli	Jl. Tanjung Harapan, Kelurahan Kuala Sambaja, Kec. Sambaja, Kab. Kutai Karatenejaya	B	Dried Seafood	20 Februari 2024	2024 - 2026



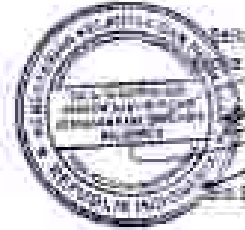

Balikpapan, 21 April 2024
 Eko Sulistianto, Balikpapan

Eko Sulistianto, S.P., M.Si

**BERTAHAP HACCP RUANG LINDUP PRODUK PADA UPT
LINDUP BOPN SALAFAPAN**

Nama UPT : Balai KPRB Salafapan
 Tahunan : Tahunan 1 Februari 2024

No	Nama SP	Nama	Kategori SP/SP	Jenis Produk/ Tiang Lindup	Jumlah	Waktu Berhasil HACCP	Tanggal Inisiasi Waktu HACCP	Tanggal Selesai Berhasil HACCP	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PT. Ocean Perdas Pabrik	J. Pesisir Lingsak, Gg. Sokolet R. 013, Kel. Bembelung, Selab	B	Papan Gelombang P3 Papan Gelang	4	04/01/2024 05/01/2024	01 - 30 Januari 2024	07 Februari 2024 - 07 Februari 2024	Hasil HACCP
2	Co. Top 3 Lumajang	J. Pesisir No. 11, Kel. Mangga Gbu, Kel. Bembelung Timur, Kab Salafapan	B	Papan Gelombang Pak Papan Pakay Pak Papan Pakay Papan Pakay Pak	4	04/01/2024 05/01/2024 05/01/2024 05/01/2024	04 Januari 2024 05 Januari 2024	05 Maret 2024 - 05 Maret 2024	Hasil Persempitan
3	Co. Sun Senter Laja	J. Pesisir Savena, Kel. Sembulan Kel. Sembulan II, Kab Salafapan	B	Dasar Senter	1	05/01/2024	04 Maret 2024	14 Maret 2024 - 14 Maret 2024	Hasil Persempitan


 Salafapan, 01 April 2024
 Kepala Balai KPRB Salafapan

 Kepala Balai KPRB Salafapan, E.P. M.S.

**SURVEILEN KONSISTENSI PENERAPAN HACCP DI UPI
LINGKUP BKIPM BALIKAPAN**

Nama UPT : : Balai KIPM Balikpapan
 Tahunan : : Triwulan I Tahun 2024

No	Nama UPT	Alamat	Peringkat Grade	Jenis Produk	Tanggal Survei	Nomor Surat Kelengkapan Hasil Survei
1	2	3	4	5	6	7
1	PT. Surtitel Kalimantan Abadi	Jl. Mahakarna No. 98, Kel. Manggar, Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan	A	Frozen Raw Shrimp Frozen Cooked Shrimp	17 Januari 2024	108.0-SKW/0204
2	CV. Tiga A (Unit Manggar)	Jl. Rekreasi No. 11, Kel. Manggar Baru, Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan	B	Fresh Demersal Fish Fresh Pelagic Fish Fresh Shrimp Fresh Swimming Crab	22 Januari 2024	208.0-SKW/0204
3	PT. Sjam Surya Mahal	Jl. Proklamasi No. 01, Kampung Kalang, Kel. Sungai Melan, Kec. Anggana, Kab. Kutai Kartanegara	A	Frozen Raw Shrimp Frozen Cooked Shrimp	23 Januari 2024	305.0-SKW/0204
4	CV. Tiga A (Unit Kampung Baru)	Jl. 21 Januari Kampung Baru, Kel. Baru Tengah, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan	B	Fresh Demersal Fish Fresh Pelagic Fish Fresh Shrimp	23 Januari 2024	408.0-SKW/0204
5	CV. Mut Barok Jaya	J. Emban Sunata, Kel. Sambutan, Kec. Samarinda II, Kota Samarinda	B	Dried Seafood	25 Januari 2024	505.0-SKW/0204

No.	Nama UPI	Alamat	Fasilitas/ Grade	Jenis Produk	Tanggal Survei	Nomor Surat Keterangan Hasil Survei
1	2	3	4	5	6	7
6.	PT. Borneo Ocean Navy	Jl. Tanjung Harapan, Kelurahan Kuala Sembaja, Kec. Sembaja, Kab. Kutai Kartanegara	B	Dried Seaweed	28 Januari 2024	375-D-SK/0224
7.	PT. Ocean Paradise Fishery	Jl. Poros Limungan Gg. Sukses Rt. 013 Kab. Sembelung, Kec. Sembelung, Kab. Berau	B	Frozen Demersal Fish Frozen Shrimp	30 Januari 2024	705-D-SK/0324



Berkeputusan, 01 April 2024

Edy Sulistyanto, S.P., M.S.

Edy Sulistyanto, S.P., M.S.



- Dashboard
- Mapping Data
- Laporan
 - Data Detail
 - Rekap per UPP per Umur
 - Rekap SKM per Laporan
 - Rekap SKM per UPP
 - Rekap SKM per Umur
 - Upload Laporan Umur
- Download
- Profile
- Logout

Laporan SKM Detail

Home / Laporan / Rekapitulasi per UPP

Data SKM

TH: (2024)

2024

Submit

50 Data terakhir Th: (1/2024), Untuk selengkapnya silahkan download data dalam bentuk excel.

Download Data

10 per line per page

NALINIKAH

Kd Es1

Nama UPP

Tahun

Tw

Batang

Nilai SKM

Jml Responden

0000

Buku KPM Balikpapan

2024

1

4,66

0,15

66

Showing 1 to 1 of 1 entries

Download Data

TANGKAP LAYAR APLIKASI SIDAK BKIPM BALIKPAPAN TRIWULAN I TAHUN 2024

